

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Fajrin Fira Akbar

2002190073



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrin Fira Akbar
NIM : 2002190073
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 Juli 2022



Fajrin Fira Akbar
NIM: 2002190073



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL

Oleh:

Nama : Fajrin Fira Akbar
NIM : 2002190073
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.

NIP/NIDN: 951400/0304056301

Pembimbing II

Dr. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L

NIP/NIDN: 211036/8931720021

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 161306/8831640017

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.

NIP/NIDN: 941387/0320086508



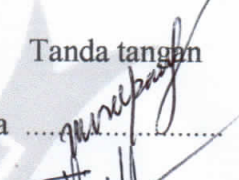

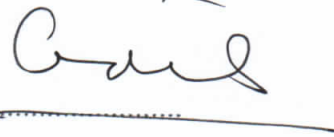
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 13 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Fajrin Fira Akbar
NIM : 2002190073
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul
"KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL"
oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 13 Juli 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajrin Fira Akbar
NIM : 2002190073
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak
Pidana Cukai Hasil Tembakau Ilegal

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2022



Fajrin Fira Akbar
NIM: 2002190073

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Ilegal.”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

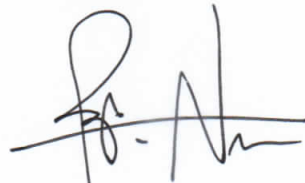
Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua Penulis terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Istri Penulis terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi/Bisnis.

Jakarta, 13 Juli 2022

Penulis



Fajrin Fira Akbar
NIM: 2002190073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	22
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	23
1.4. Metode Penelitian.....	23
1.5. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Kerangka Teoritis	31
2.1.1. Keadilan	31
2.1.2. Tujuan Pemidanaan	35
2.1.3. Kebijakan Hukum Pidana.....	39
2.1.4. Cukai	49
2.1.5. Pidana Cukai	54
2.2. Kerangka Konsep	60
BAB III PENGATURAN & PENERAPAN UPAYA NON-PENAL DALAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI (BKC) HASIL TEMBAKAU ILEGAL DI INDONESIA	65
3.1. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal.....	
3.1.1. Penegakan Hukum Represif (Kebijakan Penal).....	67
3.1.2. Penegakan Hukum Preventif (Kebijakan Non Penal).	71
BAB IV HAMBATAN & TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL SERTA PENERAPAN UPAYA NON PENAL	93
4.1. Hambatan dan Tantangan dalam Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Serta Penerapan Upaya Non Penal.....	93

4.2. Penerapan Upaya Non Penal dalam Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Serta Penerapan Upaya Non Penal.....	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Nama : Fajrin Fira Akbar
NIM : 2002190073
Judul : Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Ilegal

Salah satu penerimaan negara yang dalam beberapa tahun terakhir selalu melebihi target penerimaan negara adalah cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan jumlah produksi yang dihasilkan dari produk tembakau/rokok, serta berdampak pada permintaan pasar yang menggerus daya belinya. Meski demikian, kebijakan penyesuaian tarif cukai serta operasi pengendalian rokok ilegal (Operasi Gempur) dinilai efektif mengendalikan penerimaan cukai hasil tembakau/rokok hingga akhir tahun 2020. Selain itu, kenaikan tarif cukai juga berkontribusi pada peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kepabeanan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Disamping itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan; Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal harus dilakukan secara terus menerus dan seiring dengan penerapan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif dan penegakan hukum pidana setelah terjadinya suatu kejahatan, sedangkan kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. kejahatan itu sendiri, Keberhasilan upaya penertiban dan penegakan hukum terhadap peredaran produk tembakau ilegal sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak. Tidak hanya sebatas upaya yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, namun juga kepedulian berbagai pihak mulai dari pengusaha pabrik yang memproduksi rokok hingga pengecer rokok agar dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, dan mengkonsumsi hasil tembakau atau rokok ilegal. Peneliti merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk membahas upaya penal dan non penal dalam pemberantasan tindak pidana cukai, agar analisa yang dilakukan menjadi lebih lengkap, serta gunakan teori-teori lainnya sehingga dapat memberikan temuan-temuan terbaru terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana cukai.

Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Kejahatan, Cukai

ABSTRACT

Name : Fajrin Fira Akbar
NIM : 2002190073
Title : *Non-Penal Policy in Efforts to Eradication of Acts
Criminal Excise on Illegal Tobacco Products*

One of the state revenues which in recent years has always exceeded the target of state revenues is excise. Excise is a state levy imposed on certain goods that have the characteristics stipulated in the Excise Law. The economic conditions during the Covid-19 pandemic have had an impact on the decline in the number of productions resulting from tobacco products/cigarettes, as well as the impact on market demand, which has eroded its purchasing power. Nevertheless, the policy of adjusting the tariffs for excise duty as well as the operation to control illegal cigarettes (Operation iGempur) were considered effective in controlling the receipt of excise taxes on tobacco products/cigarettes until the end of the year 2020. In addition, the increase in excise tariffs also contributed to increasing the number of receipts from the customs sector. This research method is descriptive with a normative juridical approach. Besides, the author uses qualitative research methods, namely describing and analyzing phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. Based on the analysis that has been done, the researcher concludes; Law enforcement efforts in eradicating the circulation of excisable goods from illegal tobacco products must be carried out continuously and in tandem with the implementation of penal and non-penal policies. The penal policy is a form of crime prevention that focuses on repressive actions and criminal law enforcement after the occurrence of a crime, while the non-penal policy focuses more on preventive or preventive actions before the occurrence of a crime by eliminating the factors that cause the crime itself, The success of efforts to control and enforce laws against the circulation of illegal tobacco products is largely determined by the support of all parties. Not only limited to the efforts made by Customs and Excise officers, but also the concern of various parties ranging from factory entrepreneurs who produce cigarettes to cigarette retailers in order to comply with the provisions of the legislation in the field of excise. community leaders, religious leaders and public figures to guide and provide public awareness so as not to produce, distribute, sell, store, and consume tobacco products or illegal cigarettes. The researcher recommends further researchers to discuss penal and non-penal efforts in eradicating excise crimes, so that the analysis carried out becomes more complete, and uses other theories so that they can provide the latest findings related to efforts to eradicate excise crimes.

Keyword: *Non-Penal Policy, Crime, Excise*